

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi

Perumusan visi pembangunan Kota Pasuruan dalam 20 tahun ke depan, dilakukan dengan mempertimbangkan filosofi hidup masyarakat Kota Pasuruan, yakni **"SURA DIRA SATYA PATI"**. Sesanti ini mengandung makna Berani, Teguh Hati dan Setia kepada pimpinan Negara dan Agama, serta melambangkan bahwa masyarakat Kota Pasuruan akan mengingat perjuangan dan jasa pahlawan Untung Surapati. Dengan sesanti tersebut terkandung makna untuk mewujudkan tekad Pemerintah dan masyarakat Kota Pasuruan yang senantiasa bekerja keras, pantang menyerah dan selalu menjaga keserasian hubungan antar manusia, manusia dengan alam dan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dengan filosofi Kota Pasuruan tersebut perlu ditetapkan visi pembangunan daerah periode 2006-2025 agar pembangunan ke depan lebih terarah dan berkelanjutan. Adapun Visi pembangunan Kota Pasuruan adalah:

"Terwujudnya Kota Pasuruan Sebagai Kota Perniagaan Menuju Masyarakat Madani dan Sejahtera"

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kota Pasuruan diharapkan mampu berkembang menjadi kota dengan sektor perdagangan, industri dan jasa sebagai tulang punggung perekonomian daerah, dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran untuk mewujudkan masyarakat madani dan sejahtera. Perwujudan kondisi tersebut didukung oleh tata pemerintahan yang baik, kepastian hukum dan HAM, lingkungan hidup yang lestari, akses terhadap pelayanan sosial dasar, kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur dasar publik yang memadai serta terjaminnya ketentraman dan ketertiban.

Sebagai kota yang berlokasi strategis pada jalur Pasuruan-Malang dan Surabaya-Bali, Kota Pasuruan telah lama dikenal dengan perdagangannya yang maju. Di masa lalu, Pasuruan juga dikenal sebagai kota bandar kuno, yang memiliki dukungan infrastruktur perdagangan vital berupa pelabuhan yang cukup ramai yang berfungsi sebagai pintu perniagaan sehingga menyebabkan mata rantai aktivitas

ekonomi dari sektor hulu sampai hilir turut bergerak dinamis. Selain itu, Kota Pasuruan secara geografis letaknya cukup strategis sebagai pelabuhan transit dan pasar perdagangan antar pulau. Posisinya yang berada di tengah wilayah Kabupaten Pasuruan, juga menjadikan Kota Pasuruan sebagai “pusat” perdagangan bagi wilayah yang mengelilinginya; di samping aktivitas jasa-jasa lain yang juga menonjol. Ke depan fungsi pelabuhan Kota Pasuruan akan ditingkatkan dari pelabuhan pengumpan (lokal) menjadi pelabuhan pengumpul (regional).

Masyarakat madani Kota Pasuruan diharapkan merupakan sebuah komunitas sosial demokratis, yang fundamennya adalah keadilan dan kesetaraan. Demokratis yang dimaksud adalah demokratis dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat, serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pelaksanaan pembangunan di Kota Pasuruan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara material maupun spiritual. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah antara lain memfasilitasi, mendorong dan menjamin keberlangsungan peningkatan kegiatan perekonomian kota melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Dalam konteks ini sejahtera berarti masyarakat telah berada dalam kondisi aman dan sentosa (terlepas dari segala gangguan dan kesulitan), makmur (telah terpenuhinya seluruh kebutuhan dasarnya sesuai dengan standar hidup yang layak bagi kemanusiaan) dan tentram.

3.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi Pembangunan Kota Pasuruan 2006–2025 sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen untuk mengarah pada pencapaian kondisi akhir adalah:

1. Mengembangkan Kota Pasuruan sebagai Kota Perdagangan, Industri dan Jasa yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Berkelanjutan
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
4. Mewujudkan Keswadayaan Masyarakat dan Harmonisasi sosial
5. Mengaktualkan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kelokalan

3.2.1 Mengembangkan Kota Pasuruan sebagai Kota Perdagangan, Industri, dan Jasa yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Berkelanjutan.

Sebagai kota bandar kuno di belahan timur Pulau Jawa yang pada awal pengembangannya dirintis oleh Pemerintah kolonial Belanda, Kota Pasuruan menjadi pusat perniagaan bagi daerah-daerah sekitarnya. Jejak keberadaan pusat-pusat perniagaan inilah yang menyebabkan aktivitas perdagangan Kota Pasuruan cukup ramai, sehingga sektor jasa perdagangan mampu menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi PDRB Kota Pasuruan, di samping sektor keuangan dan jasa-jasa lainnya. Selain perdagangan umum, komoditas perdagangannya antara lain terkait secara timbal balik dengan industri produk-produk unggulan mebel/kayu dan cor logam.

Adapun pelaku usaha di sektor perdagangan dan industri tersebut, didominasi oleh kelompok usaha berskala mikro-kecil-menengah dan bertipe non formal. Dua ciri tersebut mencerminkan karakter usaha yang lekat dengan ekonomi kerakyatan. Jika pada sektor industri bentuk usaha mereka adalah industri kecil rumah tangga (IKRT), maka pada sektor perdagangan bentuk usahanya adalah pracangan rumah tangga, pertokoan, juga pedagang keliling dan pedagang kaki lima (PKL). Sedangkan jasa-jasa lainnya didominasi kelompok menengah dan besar yang bertipe formal.

Ke depan, diharapkan segmen ini akan mampu bertumbuh, baik dalam jumlah unit usaha dan kelembagaan maupun nilai dan volum transaksinya. Guna menjaga dan mengembangkan kinerja sektor perdagangan, industri dan jasa maka dilakukan upaya revitalisasi fungsi Pelabuhan Pasuruan sebagai salah satu infrastruktur strategis.

Luas wilayah Kota Pasuruan yang kurang memungkinkan bagi pengembangan sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian), menyebabkan struktur perekonomiannya bertipe sekunder – tersier; dimana sektor perdagangan, industri dan jasa merupakan sektor unggulan yang menjadi lokomotif penggerak perekonomian Kota Pasuruan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa ketiga sektor tersebut merupakan penyumbang terbesar terhadap penambahan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Pasuruan.

Apabila dicermati lebih jauh, maka dapat diketahui bahwa sektor industri Kota Pasuruan didominasi oleh dua sub sektor utama, yakni: sub sektor mebel dan sub sektor logam. Produk mebel Kota Pasuruan telah memiliki reputasi baik di pasaran lokal, regional, nasional bahkan internasional. Pasar mebel di Kelurahan Bukir (dan sekitarnya) yang senantiasa ramai di kunjungi pembeli dari luar Kota Pasuruan, merupakan salah satu bukti pengakuan pasar atas kualitas mebel Kota Pasuruan. Berbeda dengan produk mebel, hasil kerajinan cor logam Kota Pasuruan masih dikenal sebatas di pasar lokal dan regional.

IKRT yang menghasilkan beragam produk mebel, tersebar (utamanya) di sentra-sentra kerajinan mebel yang berlokasi di Kelurahan Bukir, Petahunan, Krapyak, Randusari dan Gentong. Selain lima kelurahan tersebut, pengrajin mebel juga tersebar di hampir setiap kelurahan-kelurahan di Kota Pasuruan. Apabila setiap satu unit usaha kerajinan mebel dengan skala rumah tangga ini, secara rata-rata mampu menyediakan lapangan kerja bagi 3-6 orang tenaga kerja; maka dapat kita simpulkan bahwa industri kerajinan mebel skala rumah tangga, sebagai bentuk usaha ekonomi rakyat, memiliki peran yang signifikan dalam menyediakan lapangan kerja di Kota Pasuruan.

Peran ekonomi rakyat di sektor perdagangan Kota Pasuruan, ditunjukkan secara nyata oleh kontribusi pedagang kaki lima (PKL) dalam memberikan sumber penghasilan dan menyerap tenaga kerja. Jumlah PKL yang meningkat di antaranya mengindikasikan bahwa PKL merupakan profesi alternatif yang cukup menarik untuk berusaha. Sebagian besar PKL tersebut berlokasi di kawasan-kawasan perniagaan dan pusat-pusat keramaian publik yang tersebar di Kota Pasuruan. Oleh karena itu Pemerintah Kota berupaya untuk menata lokasi usaha PKL, agar tidak mengganggu ketertiban umum sekaligus mampu meningkatkan pendapatan PKL.

Industri Kerajinan Rumah Tangga atau IKRT (baik yang bergerak di sektor mebel maupun cor logam) dan PKL, merupakan sebagian dari bentuk ekonomi rakyat yang bergerak di sektor non formal. Dari sisi penyediaan lapangan kerja, sektor non formal di Kota Pasuruan mampu menyerap tenaga kerja ketika sektor formal mengalami kelesuan usaha akibat krisis ekonomi. Namun demikian sektor non formal belum dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku usahanya secara optimal.

Sektor formal yang meliputi sub sektor perdagangan, industri dan jasa dikembangkan berdasarkan keunggulan lokasi strategis, yang ditunjang dengan ketersediaan sarana prasarana yang memadai, antara lain dikembangkannya

Pelabuhan Pasuruan; dengan memperhatikan aspek *sustainable development* dan penataan ruang (contoh pengembangan CBD); serta tetap mempertahankan eksistensi pelaku ekonomi kerakyatan.

Oleh karena itu, ke depan rumusan kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Pasuruan akan difokuskan pada pemberdayaan sektor non formal secara komprehensif, tanpa meninggalkan sektor formal, untuk meningkatkan kinerja para pelaku usahanya, meliputi: pengelolaan bahan baku, produksi, permodalan, pemasaran sampai persaingan usaha; demikian pula untuk sektor jasa lainnya (selain perdagangan). Pemberdayaan ini juga melibatkan peran aktif para pemangku-kepentingan untuk menyatukan gerak dan langkah, melalui mekanisme kemitraan yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi rakyat di Kota Pasuruan.

Aktivitas manusia, terutama aktivitas produktif dibidang ekonomi, turut mempengaruhi kualitas lingkungan. Perilaku manusia yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan, akan menimbulkan penurunan daya dukung lingkungan. Akibatnya, pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) akan terancam, karena daya dukung lingkungan tidak sebanding dengan kebutuhan untuk menunjang aktivitas manusia. Ancaman terhadap pembangunan berkelanjutan akan berpotensi menurunkan kualitas kehidupan manusia itu sendiri.

Pengembangan sektor ekonomi unggulan Kota Pasuruan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dari sudut pandang kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi akan dikatakan berkualitas apabila pencapaiannya tidak menimbulkan penurunan daya dukung lingkungan. Harapannya, pertumbuhan ekonomi bukan hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek bagi generasi sekarang berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada generasi mendatang untuk memperoleh peningkatan kualitas hidup dalam jangka panjang.

Beragam permasalahan lingkungan (misal: pencemaran udara, air dan tanah), mendorong Pemerintah Kota Pasuruan untuk melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan, yang terutama ditujukan bagi pengendalian produksi sampah, dengan prinsip: *re-use*, *re-duce* dan *re-cycle*. Pada intinya, pelaksanaan prinsip-prinsip ini mengajak kepada segenap pelaku usaha untuk menghemat penggunaan bahan baku yang berasal dari sumber daya alam yang tak terbarukan, sekaligus untuk meminimalisir sampah yang dihasilkan dari aktivitas produktif.

Selain melalui kampanye tersebut, Pemerintah Kota Pasuruan juga berupaya untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk mengatur aktivitas ekonomi agar tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, antara lain:

- a. Mengatur penggunaan ruang secara proporsional untuk aktivitas konservasi dan budidaya;
- b. Mengubah lahan kritis, terutama di pesisir utara Kota Pasuruan, menjadi kawasan konservasi sumber daya alam dan kawasan budidaya;
- c. Memelihara dan mengembangkan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai ruang publik sekaligus resapan air hujan.

3.2.2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Kota Pasuruan, pemerintah kota telah berupaya untuk menegakkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas; demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Ketiga prinsip tersebut dilaksanakan secara simultan pada setiap tahapan pembangunan dan pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Sampai saat ini, pemerintah kota telah mengadopsi berbagai bentuk partisipasi guna menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Terkait perencanaan pembangunan, sejak tahun 2006, pemerintah kota telah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan tingkat kota; sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SISRENAS). Untuk pelaksanaan pembangunan, pemerintah kota juga melibatkan peran aktif masyarakat dalam format, antara lain, *public private partnership* (kemitraan pemerintah-masyarakat); khususnya dalam penyediaan infrastruktur publik. Format kemitraan ini dilatarbelakangi adanya fakta yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya (terutama dana) dalam menyediakan barang publik. Salah satu wujud nyata bentuk kemitraan ini adalah pembangunan sarana perniagaan, jalan maupun pengembangan perumahan oleh swasta.

Sementara itu, pelaksanaan prinsip transparansi telah dirintis oleh pemerintah kota dengan menyediakan akses bagi publik untuk mendapatkan

informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, diantaranya adalah: penyediaan papan baca, baliho, penyelenggaraan lelang pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, maupun pembuatan situs (*web site*) pemerintahan. Selanjutnya, penegakan prinsip akuntabilitas juga telah dilaksanakan mulai tahap perencanaan target kinerja hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja, yang diwujudkan dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) maupun Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD).

Namun demikian dalam penyelenggaraan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan pembangunan, masih diperlukan berbagai upaya pengembangan dan terobosan; agar mampu berkontribusi secara optimal dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada penyelenggaraan musrenbang masih ditemui adanya kesenjangan pemahaman antara pemangku-kepentingan dengan aparatur pemerintah terkait dengan konsep perencanaan pembangunan. Begitu pula pada penegakan prinsip transparansi juga dihadapkan pada kendala berupa masih kurang memadainya penyediaan informasi. Selain itu, dalam penyelenggaraan akuntabilitas masih ditemui kendala berupa sulitnya pengembangan sistem informasi berbasis data akurat yang mampu menentukan keterukuran kinerja secara obyektif.

Berbagai kendala tersebut, mendorong pemerintah kota untuk semakin meneguhkan komitmen guna meningkatkan efektifitas prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan. Prinsip partisipasi harus dibangun dengan basis penguatan keberdayaan (*empowering*) masyarakat guna mereduksi tingkat kesenjangan (*lag*) pemahaman antara masyarakat dengan birokrat. Penyelenggaraan prinsip transparansi, disamping menyediakan akses informasi bagi publik, juga harus dikembangkan sistem komunikasi dua arah yang efektif. Penyelenggaraan prinsip akuntabilitas harus dikembangkan lebih efektif agar mengarah pada terwujudnya obyektifitas pertanggungjawaban kinerja.

Guna mewujudkan harapan tentang tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Pasuruan, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain:

1. Mendorong peran kelembagaan masyarakat sebagai salah satu sarana pemberdayaan, dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep penyusunan rencana pembangunan berbasis kinerja; demi .
2. Mengembangkan pola kemitraan (*partnership*) antara pemerintah dengan masyarakat yang berbasis *win-win solution*, baik dari sisi penggunaan sumber daya maupun penerimaan manfaat.
3. Menyediakan dan mengembangkan akses informasi secara merata yang ditunjang dengan pembangunan karakter masyarakat berbasis informasi (*society based information*) dan pengetahuan (*society based knowledge*).
4. Merintis pembangunan sistem informasi kinerja berbasis data, mulai tahap perencanaan (penetapan target kinerja), pelaksanaan (pengawasan *progress* pencapaian target kinerja) dan evaluasi (pengukuran dan penyusunan laporan kinerja). Akuntabilitas kinerja pada tingkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) juga harus ditunjang dengan penyusunan dan pelaksanaan *Standart Operating Procedure* (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Khusus bagi SKPD penyedia jasa layanan publik, juga harus memiliki Standar Pelayanan Publik (SPP).
5. Penuntasan penataan kelembagaan daerah yang mengarah pada efektifitas dan efisiensi birokrasi, termasuk diantaranya adalah restrukturisasi wilayah.
6. Memberdayakan aparatur pemerintah melalui peningkatan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas secara *merit system*; yang menunjang terwujudnya prinsip *the right man on the right place* dalam proses *staffing* serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pelaksanaan remunerasi (*remuneration*) gaji (*payment/salary*) berbasis kinerja.
7. Penyediaan prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai, terutama yang terkait dengan pelayanan publik.
8. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah yang mengarah pada kemandirian fiskal, sebagai salah satu pengejawantahan prinsip otonomi daerah dari sisi keuangan.

3.2.3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Keberhasilan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, erat kaitannya dengan kinerja pengelolaan aspek kependudukan. Kinerja pengelolaan kependudukan secara kuantitas tercermin pada perkembangan data kependudukan,

yang menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk masih berada pada kategori moderat. Artinya, secara kuantitas pertumbuhan penduduk relatif terkendali. Capaian kinerja ini merupakan sumbangsih bersama antara program pengendalian penduduk yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, dengan partisipasi aktif masyarakat.

Pengelolaan kependudukan dari aspek kualitas tercermin, antara lain, dari rasio ketergantungan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran agregat dari pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Data kependudukan menunjukkan bahwa tipe struktur umur penduduk Kota Pasuruan adalah mengarah pada karakteristik *intermediate* yang masih mempunyai ciri cenderung agak *ekspansif*, walaupun mulai *constrictive*. Secara ringkas, struktur usia penduduk didominasi usia produktif (15-64), yang semakin mengarah pada penduduk usia tua. Pada tahun 2008, rasio ketergantungan tercatat sebesar 49,74. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif dengan penduduk usia produktif.

Dalam konstelasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, kinerja IPM Kota Pasuruan relatif prospektif. Di mana, capaian IPM Kota Pasuruan mampu mencatatkan hasil di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur; walaupun laju *short fall*-nya berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Apabila kondisi ini dipetakan dalam suatu kuadran, posisi IPM Kota Pasuruan berada dalam kuadran II. Kondisi ini merupakan ancaman namun sekaligus merupakan peluang bagi pembangunan manusia di Kota Pasuruan.

Uraian ringkas di atas menunjukkan rekam jejak pembangunan sumber daya manusia di Kota Pasuruan, yang akan dijadikan pijakan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Harapannya, keberhasilan pembangunan kualitas sumber daya manusia akan ditandai dengan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, utamanya, melalui pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Laju pertumbuhan penduduk yang terkendali, harus disertai pula dengan penurunan rasio ketergantungan secara nyata. Artinya, melalui pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pengangguran secara efektif, akan membantu peran angkatan kerja (sebagai bagian dari kelompok penduduk usia produktif) dalam "menanggung" kelompok usia non produktif.

Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan daya beli; yang secara agregat tercermin pada capaian IPM. Ke depan, peningkatan kinerja IPM secara keseluruhan ditekankan pada peningkatan

laju *short fall*-nya di samping menjaga capaian IPM agar tetap tinggi, dengan fokus utama pada perbaikan indeks kesehatan disertai dengan upaya menjaga dan mengembangkan capaian kinerja indeks pendidikan dan indeks daya beli. Harapannya, posisi IPM Kota Pasuruan akan bergeser dari kuadran II menuju kuadran I.

Ditengarai, relatif rendahnya indeks kesehatan memiliki kontribusi terhadap rendahnya *shortfall* IPM Kota Pasuruan. Kinerja indeks kesehatan Kota Pasuruan yang relatif lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Jawa Timur, memberikan 'ruang' bagi upaya peningkatan kinerja IPM maupun laju *short fall*-nya, ketika kinerja komponen lainnya telah memasuki fase 'kematangan' (*maturity*) dengan capaian yang relatif tinggi. Apabila laju *shortfall* dapat dipercepat, maka posisi IPM Kota Pasuruan akan bergerak menuju kuadran I (capaian IPM tinggi dan *shortfall* tinggi). Demikian pula sebaliknya, apabila pemerintah kota tidak mampu mengantisipasi rendahnya kinerja indeks kesehatan, maka komponen ini akan beralih menjadi ancaman dan akan mendorong IPM Kota Pasuruan ke kuadran III (capaian IPM rendah dan *shortfall* rendah)

Sebagai upaya untuk mewujudkan harapan tersebut, maka pemerintah kota berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penuntasan program wajib belajar pendidikan menengah (wajardikmen) 12 tahun, utamanya melalui pelaksanaan agenda peningkatan dan pemerataan aksesibilitas layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan aksesibilitas layanan kesehatan; khususnya untuk menekan angka kematian bayi lahir dan ibu melahirkan meninggal, yang disertai dengan penurunan kejadian penyakit menular dan perbaikan status gizi balita .
3. Peningkatan ketrampilan tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja, diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan TPAK dan TKK serta menurunkan TPT. Pencapaian kondisi ini juga disertai dengan peningkatan kualitas hubungan industrial, pencegahan dan penyelesaian konflik buruh-majikan maupun peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Penumbuhan jiwa kewirausahaan sebagai alternatif jitu untuk menciptakan lapangan kerja, di tengah kondisi ekonomi yang sedang mengalami stagnasi bahkan kontraksi.

5. Peningkatan peran aktif perempuan dalam berbagai bidang kehidupan secara proporsional, yang disertai dengan upaya-upaya perlindungan anak.
6. Pengendalian angka kelahiran yang pada tahap lebih lanjut akan disertai dengan peningkatan keluarga sejahtera.
7. Penguatan peran aktif pemuda dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan, yang disertai dengan revitalisasi fungsi olah raga bagi aktivitas edukasi, rekreasi dan kompetisi.
8. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang ditunjang dengan perbaikan kinerja administrasi kependudukan.

3.2.4. Mewujudkan keswadayaan masyarakat dan harmonisasi sosial

Pembangunan politik dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran bagi warga masyarakat tentang bagaimana memahami, berpikir dan bertindak sebagai warga negara. Keberhasilan pembangunan politik dapat diukur dari tingkat partisipasi warga. Partisipasi warga menjadi indikator karena menggambarkan esensi penerapan demokrasi. Demokrasi secara substantif menghendaki keterlibatan secara aktif dan otonom seluruh komponen masyarakat, agar aspirasi masyarakat dapat diketahui secara pasti.

Dari *event* pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999, 2004 dan 2009, termasuk di dalamnya *event* pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif (DPR, DPD dan DPRD), secara umum partisipasi masyarakat cukup baik. Dalam konteks lokal, pemilihan Kepala Daerah tahun 2005 dan 2010 berlangsung tertib dan kondusif.

Keberhasilan penting yang telah diraih dalam kehidupan sosial politik adalah suksesnya pemilihan Kepala Daerah/Walikota, pemilu langsung anggota DPR, DPD dan DPRD Kota Pasuruan, serta pemilihan presiden dan wakil presiden, yang berlangsung secara aman dan demokratis pada tahun 2009. Melalui pemilu tahun 2009 masyarakat Kota Pasuruan telah memilih 25 orang wakil-wakilnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan rincian masing-masing fraksi: 7 orang dari fraksi Kebangkitan Bangsa, 6 orang dari fraksi Pembangunan Demokrat, 4 orang dari fraksi Amanat Karya, 4 orang dari fraksi PDIP, dan serta 4 orang fraksi Keadilan Hati Nurani. Partisipasi masyarakat Kota Pasuruan dalam aktivitas politik cukup tinggi.

Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi yang dibutuhkan agar interaksi sosial dapat berlangsung normal, sehingga aktivitas-aktivitas lain terkait dengan kebutuhan hidup manusia (misal: aktivitas ekonomi dan budaya) dapat tumbuh dan berkembang. Adapun sumber ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yakni: perilaku manusia (*man made*) dan fenomena alam (*natural disaster*). Untuk itu, ancaman terhadap keamanan dan ketertiban yang ditimbulkan oleh perilaku manusia, dapat diminimalisir ketika interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa memperhatikan kaidah dan norma yang berlaku, atau dengan kata lain supremasi hukum dapat diwujudkan. Karakter masyarakat, institusi sosial dan figur publik memiliki peran penting bagi upaya untuk mewujudkan perilaku manusia yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Pada dasarnya masyarakat Kota Pasuruan memiliki karakter yang agamis, sehingga senantiasa memperhatikan nilai-nilai agama dalam setiap gerak langkah hidupnya. Kondisi ini semakin diperkuat dengan mantapnya fungsi dan peran institusi sosial keagamaan (misal, pondok pesantren), dalam mengarahkan tindakan anggota masyarakat agar selaras dengan ajaran agama. Di samping itu, masyarakat Kota Pasuruan cenderung memiliki tokoh agama yang mereka jadikan figur dalam setiap tindakannya. Kondisi masyarakat tersebut, merupakan faktor pendukung bagi upaya Pemerintah Kota untuk mewujudkan supremasi hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Semangat pembangunan partisipatif, mendasari kebijakan Pemerintah Kota untuk melibatkan institusi sosial dan figur publik, agar percepatan pencapaian kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat tercapai.

Kondisi geografis Kota Pasuruan yang berada di dataran rendah dan dilintasi oleh tiga sungai besar (Kali Welang, Gembong dan Petung), yang juga bermuara di wilayah Kota Pasuruan; merupakan faktor yang menyebabkan Kota Pasuruan rentan terhadap ancaman bencana banjir. Selain karena perilaku manusia, bencana alam juga merupakan sumber ancaman bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan ancaman bencana alam. Mereka hanya dapat mengelola risiko tersebut, yakni meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya.

Sebagai upaya untuk mengelola risiko yang ditimbulkan oleh bencana alam, maka Pemerintah Kota Pasuruan merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk

meminimalisir dampak yang merugikan bagi keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah membentuk satuan tugas penanggulangan bencana di setiap kecamatan, yang ditunjang dengan pembentukan tim SAR (*search and rescue*) Kota Pasuruan juga pasukan pemadam kebakaran (damkar) Kota Pasuruan. Di samping itu, penanganan bencana alam juga melibatkan PMI (Palang Merah Indonesia) Kota Pasuruan, Pramuka dan Palang Merah Remaja (PMR), Taruna Siaga Bencana, dll.

Pemerintah Kota Pasuruan juga menjalin kerja sama secara aktif dengan jajaran institusi militer dan institusi kepolisian se-Kota Pasuruan, dalam format Bapeltibda, untuk menjaga kondusivitas kehidupan masyarakat yang mendukung pencapaian keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentu saja, partisipasi aktif masyarakat juga memiliki kontribusi signifikan dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat di Kota Pasuruan.

Kemiskinan di Kota Pasuruan akan menjadi masalah yang perlu ditangani secara cermat dan serius. Meskipun di masa mendatang jumlah kemiskinan dapat ditekan, tetapi masalah kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin seperti kenaikan harga BBM secara langsung akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan tetapi juga kerentanan dan kerawanan masyarakat untuk menjadi miskin.

Persentase kemiskinan Kota Pasuruan menempati urutan ke 10 terbesar di Jawa Timur. Artinya, masih banyak di antara masyarakat Kota Pasuruan yang belum sejahtera sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk pengentasannya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah keluarga miskin yakni: 7.749 KK (2007) meningkat menjadi menjadi 9.009 KK (2009).

Sejalan dengan hal tersebut, berbagai program kesejahteraan sosial di Kota Pasuruan bertujuan untuk menjamin standar hidup yang memadai bagi semua anggota masyarakat dan untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial. Beberapa kategori penyandang masalah sosial di antaranya adalah pengemis, gelandangan, anak jalanan, tuna susila, kekerasan pada anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), *trafficking* pada anak dan perempuan dan sebagainya. PMKS di Kota Pasuruan mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir yakni 14.368 (2006) menurun menjadi 8.748 (2007), dan menjadi 5.506 (2008).

Ke depan diharapkan masyarakat Kota Pasuruan merupakan sebuah komunitas sosial demokratis, di mana menjadi yang fundamennya adalah keadilan dan kesetaraan yang bermuara pada demokratisasi, yang dibentuk dari adanya partisipasi nyata anggota kelompok masyarakat. Sementara hukum diposisikan sebagai satu-satunya alat pengendalian dan pengawasan perilaku masyarakat sehingga tercipta keamanan dan ketertiban lingkungan. Bersamaan dengan itu upaya pemberdayaan melalui berbagai program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan terutama penurunan kemiskinan dan pengangguran akan dapat terlaksana dengan baik sehingga terwujud konsolidasi demokrasi yang berlandaskan kesantunan sosial, terwujud keamanan dan ketertiban lingkungan berbasis masyarakat, serta terwujud kesejahteraan sosial berbasis keswadayaan masyarakat.

Dalam tataran praktis, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Pasuruan kesemuanya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kota, baik secara material maupun spiritual. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah berperan memfasilitasi, mendorong dan menjamin keberlangsungan peningkatan kegiatan perekonomian kota, melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam upaya mewujudkan keswadayaan masyarakat dan harmonisasi sosial diperlukan adanya penguatan fungsi dan kelembagaan partai politik dan kedewasaan berpolitik masyarakat, peningkatan kapasitas dan antusiasme masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, peningkatan rehabilitasi sosial, serta peningkatan peran lembaga keswadayaan dalam menciptakan kemandirian masyarakat.

3.2.5. Mengaktualkan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kelokalan

Perkembangan kehidupan beragama di Kota Pasuruan selama ini relatif menggembirakan terutama pada tingkat pelaksanaan keagamaan yang didukung oleh meningkatnya penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan. Secara langsung maupun tidak langsung pembangunan agama telah memberikan kontribusi dalam berbagai aspek pembangunan. Namun realitas di masyarakat masih dirasakan adanya hal-hal yang kurang menggembirakan. Pembangunan keagamaan masih sering dihadapkan pada gejala negatif yang cukup memprihatinkan seperti perilaku asusila, praktik korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan berbagai jenis kriminalitas lainnya. Demikian pula adanya kecenderungan makin

melemahnya pengamalan etika dan nilai-nilai luhur agama, perilaku permisif, meningkatnya angka perceraian dan ketidakharmonisan keluarga, tawuran, pornografi, maupun pornoaksi, dlsb. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan ajaran agama tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara nilai ajaran agama dengan perilaku sosial di masyarakat.

Pesatnya kemajuan teknologi informasi mengakibatkan arus globalisasi semakin deras, sehingga batas ruang dan waktu antar wilayah pun semakin kabur. Salah satu dampak globalisasi adalah bahwa masyarakat makin mudah mengenal nilai-nilai kehidupan yang berasal dari budaya luar (asing), tidak terkecuali masyarakat Kota Pasuruan. Maka, terjadilah asimilasi budaya, di mana nilai-nilai budaya lokal akan mengadopsi nilai budaya asing. Hal ini bukan menjadi suatu masalah, sepanjang nilai-nilai budaya asing tersebut berdampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Sebagai daerah pesisir, kondisi sosial budaya masyarakat Kota Pasuruan telah mulai mengalami akulturasi. Keragaman budaya itu menjadi kekayaan yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Permasalahan budaya yang dihadapi adalah semakin besarnya pengaruh globalisasi yang berdampak pada perubahan sosial-budaya lokal, yang bila tidak diantisipasi dan dikendalikan tentunya akan berdampak pada sistem nilai-nilai sosial budaya lokal.

Kehidupan masyarakat Kota Pasuruan relatif rukun, toleran, dan terbuka merupakan modal dasar untuk melaksanakan pembangunan dan merealisasikan tujuan reformasi. Sikap menghargai perbedaan pendapat secara kritis yang telah cukup membudaya di masyarakat juga merupakan modal dasar untuk mengembangkan pemerintahan yang baik dan bersih (*clean government and good governance*). Demikian pula karakteristik masyarakat Kota Pasuruan yang ulet, tegas, terbuka, dan lugas bila dikelola dan disalurkan dengan baik merupakan modal dasar yang cukup besar peranannya dalam pembangunan.

Perubahan sosial tidak dapat dielakkan di tengah masyarakat yang selalu dinamis. Nilai-nilai sosial ideal yang melekat pada masyarakat Kota Pasuruan tidak berbeda dengan nilai sosial ideal Jawa pada umumnya, yaitu rasa kolektivitas menjadi sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari. Individu tidak bisa dengan leluasa berbuat tanpa ada kesepakatan kolektif dalam mencapai tujuan hidupnya. Mereka tetap terikat dengan sebuah kesadaran kolektif baik di tingkat keluarga maupun masyarakat.

Namun demikian, tingginya penetrasi budaya melalui media massa mengakibatkan pergeseran sosial yang secara ekstrem ditandai oleh perubahan orientasi dan gaya hidup. Fenomena yang tampak adalah ketimpangan perilaku yang semakin permisif. Secara formal untuk mengembangkan rasa toleransi antar umat beragama, dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang terdiri atas beberapa orang perwakilan unsur umat beragama. Namun, pada saat yang hampir bersamaan terjadi indikasi peningkatan berbagai perilaku dekadensi moral.

Masyarakat Kota Pasuruan telah memiliki kreasi karya seni dan budaya yang beraneka ragam yang merupakan potensi bagi wisata Islami, wisata sejarah dan wisata budaya. Potensi pariwisata tersebut dapat dikembangkan sebagai modal pembangunan. Pengembangan seni budaya di Kota Pasuruan diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian Kota Pasuruan. Integralitas pembangunan seni budaya dan pariwisata merupakan sesuatu yang lazim berlaku di Indonesia dan perkembangannya ke masa depan, berhubungan erat dengan kualitas kondisi alam dan lingkungan, politik dan keamanan, serta sarana dan prasarana. Pentingnya pembangunan kebudayaan di Kota Pasuruan ditujukan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jatidiri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin deras arus informasi dan pengaruh negatif budaya asing.

Pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kelokalan merupakan langkah awal, yang akan ditindaklanjuti dengan membangun pemaknaan masyarakat terhadap hakikat yang terkandung di dalamnya. Harapannya, tindakan masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai keagamaan dan kelokalan, bukan sebatas memenuhi kewajiban; namun lebih dari itu, mereka diharapkan memahami hakikatnya, sehingga manfaat atas amalan-amalan tersebut lebih efektif dalam membangun modal sosial. Melalui aktualisasi Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kelokalan ke depan diharapkan dapat terwujud kehidupan masyarakat yang dijiwai oleh pengamalan nilai-nilai keagamaan, kohesi sosial dalam suasana yang toleran dan berkeadaban, teraktualisasikannya ekspresi berkesenian dan berkebudayaan, serta terpeliharanya nilai-nilai budaya yang mampu merespons secara positif dan produktif perkembangan modernisasi yang terjadi di masyarakat.

Nilai-nilai keagamaan dan kelokalan memiliki kontribusi positif bagi pembentukan modal sosial, yang juga diperlukan bagi pembentukan masyarakat

madani di Kota Pasuruan. Modal sosial tidak akan berkembang bahkan akan terancam hilang, apabila kehidupan masyarakat kental dengan nilai-nilai hedonistik dan individual. Modal sosial hanya akan tumbuh dan berkembang ketika terdapat rasa kebersamaan yang kuat di antara anggota suatu komunitas atau masyarakat.

Hal yang perlu diantisipasi adalah ketika nilai-nilai budaya asing justru mereduksi nilai-nilai keagamaan dan kelokalan (*locally specific*) yang telah berkembang di masyarakat Kota Pasuruan. Ancaman penurunan nilai-nilai keagamaan dan kelokalan, terutama dihadapi oleh generasi muda Kota Pasuruan yang tercermin dari perilaku sebagian besar pemuda yang kurang memperhatikan norma-norma sosial dan nilai-nilai keagamaan. Generasi muda Kota Pasuruan seharusnya tidak mudah menerima budaya asing yang sarat dengan nilai-nilai hedonistik dan individual.

Memperhatikan manfaat dari modal sosial bagi pembangunan, serta melihat kondisi terdegradasinya nilai-nilai keagamaan dan kelokalan di masyarakat Kota Pasuruan, terutama generasi mudanya; maka Pemerintah Kota Pasuruan berinisiatif untuk mewujudkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kelokalan. Sebagai suatu inisiatif, tentunya kebijakan pemerintah dalam membangun modal sosial memerlukan peran aktif dari berbagai pihak; terutama institusi-institusi sosial dan keagamaan.

Pemerintah Kota Pasuruan akan merumuskan kebijakan yang ditujukan bagi pemberdayaan institusi-institusi tersebut (misal: lembaga keagamaan, lembaga sosial dan lembaga kepemudaaan), agar dapat lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam melestarikan serta mengembangkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kelokalan. Harapannya, agar gerak langkah kehidupan masyarakat Kota Pasuruan senantiasa lekat dengan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kelokalan. Langkah-langkah yang ditempuh untuk Mengaktualkan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kelokalan antara lain adalah: penanaman dan peningkatan nilai-nilai budaya yang memiliki pesan moral di kalangan masyarakat, meningkatkan dan menguatkan pengaruh positif dan peran para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta kelembagaan berbasis agama, serta meningkatkan peran aktif komunitas keagamaan dan seni budaya.